



ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH DI WILAYAH MATARAMAN TAHUN 2019- 2020

Deby Kusuma Atmaja^{1*}, Risdiana Himmati¹

¹Mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung

²Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

*Email: debykusum@gmail.com



Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui kinerja keuangan daerah di wilayah Mataraman di masa pandemic Covid-19 dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Pertumbuhan. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sudah optimal karena peran pemerintah daerah tidak terlalu dominan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh daerah, Rasio Efektivitas menunjukkan ketidakefektifitas dalam sektor keuangan dikarenakan tidak sesuai realisasi PAD dengan target penerima sehingga menyebabkan dana yang akan direalisasikan pada pemerintah daerah tidak mencukupi, Rasio Efisiensi sendiri menunjukkan anggaran PAD stabil dengan rata-rata 0,809% di tahun 2019 dan 0,709% tahun 2020 Pada Rasio Pertumbuhan sendiri menggambarkan bahwa pertumbuhannya negatif dikarenakan tingginya PAD dan belanja operasi dengan diikutinya belanja modal yang rendah.

Kata Kunci: Rasio Kemandirian; Rasio efektivitas; Rasio Efisiensi; Kinerja Keuangan

Abstract: The purpose of this study was to determine the regional financial performance in the Mataraman area during the Covid-19 pandemic seen from the Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, and Growth Ratio. The data used in this study uses secondary data using quantitative descriptive methods. The method used in this study using purposive sampling. The results of this study indicate that the Regional Financial Independence Ratio is optimal because the role of local governments is not too dominant in the implementation of programs and activities carried out by regions. The Effectiveness Ratio shows ineffectiveness in the financial sector due

to the incompatibility of PAD realization with target recipients, causing funds to be realized in the government inadequate regions, the Efficiency Ratio itself shows a stable PAD budget with an average of 0,809% in 2019 and 0,709% in 2020. The Growth ratio itself illustrates that the growth is negative due to high PAD and operating expenditures followed by low capital expenditures.

Keywords: *Independence Ratio; Effectiveness Ratio; Efficiency Ratio; Financial Performance.*

PENDAHULUAN

Reformasi keuangan daerah ditandai dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemda dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang ini guna memberi celah untuk daerah dalam menggali potensi lokal serta untuk mencapai peningkatan kinerja keuangan dalam menciptakan tingkat kemandirian daerah. Keuangan daerah bisa dijelaskan bahwa seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dan dapat menjadi aset daerah. persoalan keuangan daerah menjadi unsur penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah (Nurhayati 2015). Dalam hal keuangan daerah, Fathah (2017) mengatakan bahwa keuangan daerah memiliki tujuan agar lebih efisien dan efektivitas dalam mengelola sumber daya keuangan daerah dan mengoptimalkan layanan terhadap masyarakat dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja merupakan cerminan dari tercapainya pelaksanaan program kegiatan dalam menciptakan sasaran, tujuan, visi dan misi yang tercatat di dalam rumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) (Wahyuni 2010). Di mana dijelaskan bahwa kinerja yaitu sebuah hasil yang telah didapat oleh suatu organisasi dalam periode tertentu. Dalam mengukur prestasi sendiri dilakukan secara berkelanjutan dengan harapan dapat memberi hasil yang baik pada suatu organisasi serta upaya perbaikan atau evaluasi untuk mencapai tujuan kedepannya nanti. Dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat perlu adanya tindakan dari pemerintah berupa melakukan pemeriksaan terhadap karyawan atau pegawai dalam kinerjanya. Sektor keuangan merupakan bagian paling krusial yang dapat menggambarkan apakah masyarakat merasakan kesejahteraan.

Menurut Nurdiwaty and Zaman (2016) pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta wajib menyambatkan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Dengan dilakukannya analisis, pemerintah dapat melihat *impact* yang dihasilkan. Hasil tersebut bisa

dijadikan tolok ukur bagi semua pemerintah di Indonesia dalam menilai kinerja keuangan dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa alat ukur yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah adalah analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan. Terdapat kemungkinan besar semua provinsi di Indonesia melakukan tindakan analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah karena semua masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan berbeda apalagi di masa pandemic Covid-19 sekarang. Pada topik kali ini mengacu pada pulau terbesar nomor 5 di Indonesia yaitu pulau Jawa, terutama provinsi Jawa Timur dimana terdapat daerah di bagian barat yang menarik perhatian peneliti untuk di analisa lewat alat ukur yang digunakan.

Wilayah Jawa Timur memiliki beberapa macam keunikan daerah, selain pada pembagian perekonomiannya secara keseluruhan, tetapi juga pembagian kekhasan yang dimiliki oleh Jawa Timur yang dinilai unik serta tidak biasa. Secara garis besar, zonasi budaya dalam kegiatan perekonomian digunakan untuk mempermudah indentifikasi masyarakatnya baik secara kultural maupun secara sosial ekonomi, berdasarkan Ayu Sutarto dalam Leni (2012) membagi wilayah Jawa Timur dalam tujuh wilayah kebudayaan berdasarkan ciri khas yang merentang dari Ngawi, Kediri, Madiun, Nganjuk, Magetan, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Tulungagung sampai Blitar. Menurut (Leni (2012) bahwa masyarakat Jawa Timur memiliki karakter yang terkenal *open minded* atau terbuka, mudah mengungkapkan dan artikulatif. Hal yang dimaksudkan adalah seringnya relasi sehari-hari yang menyatakan hal-hal tanpa adanya tanpa ditutup-tutupi.

Mataraman adalah sebuah dialek atau bahasa atau logat dimana masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal jelas yang terlihat dalam dialek bahasa Jawa ini adalah dalam menggunakan bahasa yang masih halus walaupun tidak sehalus kebanyakan masyarakat di Surakarta dan Yogyakarta. Mataraman sendiri merujuk pada suatu wilayah, di mana wilayah kebudayaan tersebut meliputi wilayah di Jawa Timur bagian barat karena wilayah tersebut memiliki sejarah pernah dikuasai oleh Kesultanan Mataram. Wilayah Mataraman tersebut meliputi kabupaten Lamongan, Tuban, Mojokerto, Tuban, Nganjuk, Madiun, Kediri, Tulungagung, Blitar, Pacitan, Trenggalek, Magetan.

Daerah-daerah di wilayah Mataraman tersebut memiliki beragam kemampuan sebagai pendorong berkembangnya dari daerah-daerah tersebut baik dari teknologi, SDM, ekspor potensi yang dihasilkan dari daerah, dan sektor keuangan merupakan titik utama dari segala aspek dimana memiliki nilai dan tanggung jawab besar. Keuangan pemerintah pun menjadi sorotan umum, karena didalamnya terdapat berbagai hak seluruh masyarakat daerah yang perlu dipertanggungjawabkan. Kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan

cara menganalisis rasio keuangan berdasar informasi laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Susanto 2019). Perlu adanya tindakan dan kemampuan dari pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Menurut (Karlina and Handayani 2017) pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Kemampuan-kemampuan tersebut akan terlihat dari bagaimana pemerintah daerah mandiri atau tidaknya dalam melaksanakan berbagai program kegiatan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dimana kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola berbagai bidang yang berkaitan dengan anggaran akan di catat dalam APBD. Pemerintah diharapkan lebih mampu dalam menggali sumber keuangan khusus nya dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya (Pandjaitan, Tommy, and Untu 2018).

Terdapat aspek penting sebelum tercapainya kesejahteraan masyarakat yaitu kinerja keuangan pemerintah. Perlu adanya tindakan analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah. Menurut (Oktrivina, Siregar, and Mariana 2020) kinerja keuangan pemerintah merupakan keluaran atau hasil dari berbagai program kegiatan yang akan atau telak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah, dengan memiliki kemampuan yang dapat diukur untuk menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Mataraman diperlukannya beberapa alat ukur yaitu analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Pertumbuhan dengan maksud setiap kinerja yang dilaksanakan akan menggambarkan hasil baik atau buruk. Sehingga dapat diketahui PAD dari daerah-daerah di wilayah Mataraman tahun 2019-2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Mataraman Tahun 2019-2020

| Kabupaten | PAD Tahun 2019 | PAD Tahun 2020 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lamongan | Rp.503.985.109.600 | Rp.3.076.799.929.800 |
| Mojokerto | Rp.501.070.335.477 | Rp.542.338.009.277 |
| Nganjuk | Rp.342.768.492.189 | Rp.2.375.837.417.057 |
| Madiun | Rp.200.523.787.701 | Rp.219.449.851.124 |
| Pacitan | Rp.166.324.392.138 | Rp.194.706.585.465 |
| Magetan | Rp.192.749.207.658 | Rp.222.600.028.000 |
| Kediri | Rp.390.995.860.728 | Rp.424.921.835.514 |
| Tulungagung | Rp.439.528.127.971 | Rp.446.577.024.905 |
| Blitar | Rp.237.311.000.000 | Rp.263.661.013.500 |
| Trenggalek | Rp.280.170.365.100 | Rp.302.583.246.200 |
| Tuban | Rp.396.856.951.373 | Rp.564.655.626.322 |
| Bojonegoro | Rp.482.546.379.211 | Rp.843.284.521.811 |

Sumber: Laporan Keuangan Daerah, Kemenkeu 2021

Tabel 1.1, menunjukkan bahwa PAD di daerah wilayah Mataraman periode 2019-2020 meningkat meskipun tidak signifikan. PAD tersebut yang akan di hitung dengan alat analisis dan dapat menggambarkan serta menilai tingkat kinerja pemerintah daerah pada tahun anggaran 2019-2020. Dalam pengelolaan yang baik tidak cukup hanya dibutuhkannya SDM yang kompeten melainkan daerah harus memiliki kemampuan yang memadai sehingga dari dua hal tersebut saling berkaitan yang mana akan menghasilkan sasaran, tujuan, visi dan misi sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani dalam iuran pajak dan retribusi daerah. ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Pilat and Morasa 2017). Dengan demikian maka, suatu daerah yang kinerja keuangannya baik dapat dikategorikan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan dan kemandirian di sektor finansial untuk membiayai sendiri pelaksanaan otonomi di daerahnya.

Halim (2007) menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan daerah ialah segala kegiatan secara menyeluruh yang meliputi perencanaan, laporan, pertanggungjawaban, tata usaha, serta monitoring keuangan di daerah. PP Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, mengelola anggaran daerah merupakan segala hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan kegiatan yang dapat dinilai dengan uang, dan yang terdapat didalamnya segala aset daerah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pemerintah daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dicatat dalam APBD baik secara langsung dan tidak langsung menggambarkan pemerintah daerah mampu dalam membiayai segala kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Menurut (Handayani 2017) APBD adalah perencanaan anggaran per tahun dari pemerintah daerah yang ada di Indonesia dan telah disepakati oleh DPRD.

Pengukuran kinerja termasuk hal penting, dalam menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan di daerah. Akuntabilitas sendiri tidak hanya mampu dalam menunjukkan bagaimana anggaran di belanjakan, tetapi kemampuan yang memberikan informasi bahwa anggaran telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan sebuah capaian atau hasil dari pekerjaan di ranah keuangan berupa penerimaan dan belanja daerah, penggunaan sistem anggaran melalui kebijakan yang sesuai undang-undang pada satu periode anggaran tertentu dan diukur menggunakan analisis rasio keuangan. kinerja dapat diketahui hanya jika individu tersebut memiliki kriteria keberhasilan dimana kriteria tersebut berupa tujuan-tujuan atau target tertentu yang akan dicapai (Mokodompit, Pangemanan, and Elim 2014). (Marheni 2017)

menjelaskan hal tersebut membuktikan bahwa semakin banyaknya belanja modal yang dipakai maka akan menghasilkan hasil maksimal dalam mengukur tingkat kinerja keuangan. Alat ukur pada kinerja keuangan daerah di wilayah Mataraman periode 2019-2020 menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Pertumbuhan. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan daerah di wilayah Mataraman tahun 2019-2020. Adapun manfaat dari menganalisis rasio keuangan seperti digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan mengatur standar ukuran kinerja, dapat digunakan sebagai acuan di masa mendatang, dan profitabilitas organisasi (Rahmawati and Putra 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan hasil atau informasi dalam menganalisis kinerja keuangan daerah dengan melakukan perhitungan-perhitungan rasio. Hasil tersebut akan menjadi dasar pemerintah daerah untuk lebih teliti dalam mengelola keuangan daerah dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada riset kali ini lebih mengedepankan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah di wilayah Mataraman dalam mengelola keuangan di masa pandemic COVID-19 ini. Pada masa pandemic COVID-19 sekarang secara global tingkat perekonomian menurun drastis, Indonesia pun juga merasakan dampak tersebut maka diperlukannya analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah apakah semakin baik atau menurun dalam mengatasi di keadaan yang sekarang.

KAJIAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun, mengelola, dan melaksanakan kebijakan serta keuangan di daerahnya sendiri (Sari and Mustanda 2019). Otonomi daerah merupakan suatu pemerintahan yang menjalankan pemerintahannya dengan aturannya sendiri sesuai aspirasi rakyatnya. Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 21 dijelaskan kriteria dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Di mana pada pasal tersebut menjelaskan fungsi dari otonomi daerah bahwa pemerintah harus mengurus dan mengatur segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahannya, memilih kepala daerah, mengelola pegawai daerah, mengelola sumber daya dan aset daerah, menagih pajak dan retribusi daerah, memperoleh sumber pendapatan yang sah lainnya, dan memperoleh hak-hak lain yang telah sesuai pada undang-undang. (Ramadhani 2016) berpendapat bahwa otonomi daerah berkaitan dengan timbulnya kewajiban serta wewenang bagi daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintah secara lebih mandiri,

tidak terlalu menggantungkan bantuan dari pemerintah pusat yang dimulai dari tahap awal, merencanakan, pelaksanaan, pengawasan, mengevaluasi, dan tanggung jawab. (Halim 2007) menjelaskan ciri-ciri dari daerah yang sanggup dalam otonomi daerah yaitu daerah yang mampu dalam sektor finansial serta mengelola dan menggali sumber keuangan serta ketergantungan terhadap bantuan pusat yang harus di minimalisir sehingga peran pemerintah daerah akan lebih besar.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut (Hariyanti, Marheni, and Yenfi 2017) APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disepakati oleh DPRD dan terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan serta tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara. Segala hal yang berkaitan tentang penerimaan adalah hak dan pengeluaran hukumnya wajib dan daerah harus mencatatnya di dalam APBD. APBD yaitu perencanaan anggaran tahunan daerah, dimana satu sisi menggambarkan perkiraan untuk mendanai berbagai program kegiatan daerah dalam kurun waktu tertentu, di sisi lain menggambarkan penerimaan dan sumber penerimaan daerah untuk membatasi keluaran yang dianggarkan. Menurut (Handayani 2017) bahwa APBD merupakan sebagai dasar dalam mengelola keuangan, maka APBD sebagai pedoman pengendalian, pemeriksaan, dan memonitoring keuangan di daerah. APBD memiliki fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan sebagai penyetabil anggaran.

Kinerja Keuangan

Pada pasal 55 ayat 5 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang perlu ditetapkannya PP tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada ketentuan umum pasal 1 PP tentang laporan keuangan serta kinerja pemerintah. (Sartika 2019) menjelaskan kinerja keuangan adalah cerminan pencapaian melaksanakan kegiatan, program, dan kebijaksanaan agar terwujudnya sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Penilaian kinerja keuangan adalah sebuah sistem yang dipakai dan berguna menentukan nilai suatu objek. Menurut (Susanto 2019) tujuan kinerja keuangan adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah agar tetap fokus pada tujuan yang pada akhirnya meningkatkan efektifitas dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. (Fidelius 2013) salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Laporan Keuangan

Pada pasal 293 dan Pasal 330 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda memberikan tanggung jawab dalam manajemen anggaran daerah dengan berpedoman peraturan yang berlaku. Laporan keuangan merupakan pemberitahuan hasil yang dicapai suatu daerah yang berupa data keuangan pada periode tertentu (Lestari, Hidayati, & Habib, 2022) Menurut (Oktrivina, Siregar, and Mariana 2020) laporan keuangan yaitu hasil terakhir dari segala perhitungan yang menghasilkan informasi bermanfaat dalam mengambil kebijakan dari beberapa pihak yang berkepentingan. (Wahyuni 2010) menjelaskan tujuan laporan keuangan secara rinci dimana harus menghasilkan informasi yang memiliki nilai manfaat dalam melakukan penilaian akuntabilitas serta mengambil kebijakan yang tepat baik dari ekonomi, sosial, dan politik. Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah menurut (Sartika and Pratama 2019) untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan dalam mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Analisis Rasio Keuangan

Pemerintah daerah diberikan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahannya, pembangunan, dan layanan terhadap masyarakat dan diwajibkan untuk memberikan informasi pertanggungjawaban anggaran daerah sebagai pedoman dalam menilai kinerja keuangan. (Halim 2007) analisis rasio keuangan terhadap APBD dilakukan dengan cara perbandingan hasil yang didapat dari satu periode anggaran dengan periode sebelumnya dan akan diketahui kecenderungan yang terjadi. Berikut adalah rasio alat analisis keuangan yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian menurut (Abdul Hamid 2018) adalah ditandai adanya kemandirian dalam mendanai kegiatan baik pembangunan serta pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Rasio Kemandirian memiliki rumus:

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{PAD}{Bantuan\ Pemerintah\ Pusat} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil penelitian, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terdapat indikator agar dapat diketahui tingkat Kemandirian Daerah di wilayah Mataraman Tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

| Kemampuan Keuangan | Kemandirian | Pola Hubungan |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Rendah sekali | 0%-25% | Intruktif |
| Rendah | 25%-50% | Konsultatif |
| Sedang | 50%-75% | Partisipatif |
| Tinggi | 75%-100% | Delegatif |

Sumber: (Halim 2007)

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD mencerminkan kesanggupan daerah dalam melakukan perbandingan realisasi diterima PAD dan target diterima PAD atau yang telah dianggarkan. Rasio Efektivitas PAD mempunyai rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD, terdapat indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas daerah di wilayah Mataraman Tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

| Persentase (%) | Kriteria Efektivitas |
|-----------------------|-----------------------------|
| >100% | Efektif |
| 100% | Seimbang |
| <100% | Tidak Efektif |

Sumber: (Halim 2007)

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi yaitu menunjukkan perbandingan antara biaya (*cost*) yang digunakan dengan tujuan guna mendapat penerimaan dengan realisasi penerimaan yang di dapat.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah memiliki rumus yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Sesuai hasil perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, terdapat indikator untuk mengetahui efisiensi pada daerah di wilayah Mataraman 2019-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

| Persentase Efisiensi | Kriteria Efisiensi |
|----------------------|--------------------|
| Diatas 100% | Tidak Efisien |
| 90%-100% | Kurang Efisien |
| 80%-90% | Cukup Efisien |
| 60%-80% | Efisien |
| Kurang dari 60% | Sangat Efisien |

Sumber: (Halim 2007)

4. Rasio Pertumbuhan Keuangan

Rasio pertumbuhan adalah tingkat pengukuran seberapa baik dan konsistennya pemerintah daerah untuk meningkatkan serta mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai di sektor keuangan periode ke periode. Rasio Pertumbuhan memiliki rumus yaitu:

- a. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\frac{PAD \text{ Tahun } \rho - PAD \text{ Tahun } \rho - 1}{PAD \text{ Tahun } \rho - 1}$$

- b. Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan

$$\frac{Pendapatan \text{ Tahun } \rho - Pendapatan \text{ Tahun } \rho - 1}{Pendapatan \text{ Tahun } \rho - 1}$$

- c. Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah

$$\frac{Belanja \text{ Tahun } \rho - Belanja \text{ Tahun } \rho - 1}{Belanja \text{ Tahun } \rho - 1}$$

Gambar 1. Kerangka Pikiran



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Sesuai dengan penelitian yang telah dijalankan maka teknik yang dipakai dalam menganalisis data yaitu deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara melakukan perhitungan data-data keuangan yang telah didapat untuk memecahkan problem sesuai tujuan dari penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai peneliti pada penelitian adalah data sekunder dari situs <https://www.dipendajatim.go.id> dan www.djpk.kemenkeu.go.id. Data sekunder sendiri yaitu data yang tidak secara langsung diberikan oleh pengumpul data yang berupa catatan laporan anggaran dari berbagai publikasi yang berkaitan dengan permasalahan dibahas. Menurut Z.Zulkarnain (2020) data di maksud adalah data realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah, serta realisasi belanja modal

Sampel

Sampel adalah bagian populasi dengan karakteristik tertentu. Zaky Hidayah (2021) sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Mataraman dengan menggunakan teknik sampling yaitu *purposive sampling*. Dimana pada teknik ini digunakan dalam melakukan penelitian di masa pandemic Covid-19

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Rini Koe (2020) teknik yang dipakai pada penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan tinjauan kepustakaan dan dalam mendapatkan informasi dengan menelaah teori-teori yang dipelajari lewat jurnal yang digunakan sebagai dasar teori guna melengkapi skripsi ini. Dokumentasi yaitu dikumpulkannya berbagai data yang akan dilakukan penelitian berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di wilayah Mataraman periode 2019-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai data informasi yang diringkas dari APBD di wilayah Mataraman 2019-2020 maka penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Wilayah Mataraman 2019-2020

| Kabupaten | Pendapatan Asli daerah Tahun 2019 (Rp) | Pendapatan Transfer Tahun 2019 (Rp) | RKKD (%) | Pola hubungan |
|-------------|--|-------------------------------------|----------|---------------|
| Lamongan | Rp.503.985.109.600 | Rp.2.921.400.000 | 173 | Delegatif |
| Mojokerto | Rp.501.070.335.477 | Rp.2.921.400.000 | 16,702 | Delegatif |
| Nganjuk | Rp.342.768.492.189 | Rp.5.160.000.000 | 66,42 | Partisipatif |
| Madiun | Rp.200.523.787.701 | Rp.4.178.980.000 | 479,83 | Delegatif |
| Pacitan | Rp.166.324.392.138 | Rp.82.091.365.699 | 2,026 | Delegatif |
| Magetan | Rp.192.749.207.658 | Rp.5.379.430.000 | 35,83 | Konsultatif |
| Kediri | Rp.390.995.860.728 | Rp.1.306.196.429.983 | 0,299 | Konsultatif |
| Tulungagung | Rp.439.528.127.971 | Rp.88.654.600.000 | 4,957 | Delegatif |
| Blitar | Rp.237.311.000.000 | Rp.30.000.000 | 7,910 | Delegatif |
| Trenggalek | Rp.280.170.365.100 | Rp.4.161.510.000 | 67,324 | Delegatif |
| Tuban | Rp.396.856.951.373 | Rp.8.424.229.000 | 47,108 | Delegatif |
| Bojonegoro | Rp.482.546.379.211 | Rp.50.000.000 | 9,650 | Delegatif |

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

| Kabupaten | Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 (Rp) | Pendapatan Transfer tahun 2020 (Rp) | RKKD (%) | Pola Hubungan |
|-------------|--|-------------------------------------|----------|---------------|
| Lamongan | Rp.3.076.799.929.800 | Rp.3.067.470.000 | 1,003 | Delegatif |
| Mojokerto | Rp.542.338.009.277 | Rp.70.586.672.000 | 18,077 | Delegatif |
| Nganjuk | Rp.2.375.837.417.057 | Rp.284.983.204.000 | 8,336 | Delegatif |
| Madiun | Rp.219.449.851.124 | Rp.4.544.609.000 | 48,287 | Delegatif |
| Pacitan | Rp.194.706.585.465 | Rp.1.094.000.000.000 | 0,177 | Instruktif |
| Magetan | Rp.222.600.028.000 | Rp.17.105.000.000 | 13,013 | Delegatif |
| Kediri | Rp.424.921.835.514 | Rp.103.000.000.000.000 | 0,004 | Instruktif |
| Tulungagung | Rp.446.577.024.905 | Rp.35.000.000.000.000 | 0,012 | Instruktif |
| Blitar | Rp.263.661.013.500 | Rp.3.074.119.000 | 85,767 | Delegatif |
| Trenggalek | Rp.302.583.246.200 | Rp.4.161.510.000 | 72,709 | Delegatif |
| Tuban | Rp.564.655.626.322 | Rp.17.693.560.000 | 31,913 | Delegatif |
| Bojonegoro | Rp.843.284.521.811 | Rp.60.000.000 | 1,405 | Delegatif |

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Dijelaskan pada tabel 5.1 diatas mengenai analisis Rasio Kemandirian menunjukan bahwa tingkat kemandirian pada pemerintah daerah di wilayah Mataraman sangat baik dengan pola hubungan delegatif. Dimana menggambarkan peran pemerintah pusat tidak terlalu mendominasi. Dari penelitian diatas tingkat kemandirian paling tinggi dicapai oleh Kabupaten Madiun dengan perolehan di dapat sebesar 479,83% dengan rata-rata 203% pada periode 2019. Sedangkan untuk periode 2020 mengalami kenaikan dimana perolehan terendah dengan pola hubungan instruktif 0% dengan perolehan tertinggi sebesar 85,767% dengan rata-rata 10,03%. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Hanik & Karyanti (2014) Pola hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi.

Tabel 5.2

Perhitungan Rasio Efektivitas PAD di wilayah Mataraman 2019-2020

| Kabupaten | Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2019 (Rp) | Target Penerimaan PAD tahun 2019 | Rasio Efektivitas (%) | Kriteria Rasio Efektivitas |
|-------------|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Lamongan | Rp.2.864.496.711.416 | Rp.2.951.786.953.000 | 0,97 | Efektif |
| Mojokerto | Rp.554.999.510.279 | Rp.2.570.155.645.307 | 0,22 | Tidak Efektif |
| Nganjuk | Rp.368.272.236.478 | Rp.2.406.853.016.968 | 0,153 | Tidak Efektif |
| Madiun | Rp.229.206.394.170 | Rp.1.961.813.561.235 | 0,116 | Tidak Efektif |
| Pacitan | Rp.199.044.387.518 | Rp.1.865.400.910.857 | 0,106 | Tidak Efektif |
| Magetan | Rp.237.377.706.042 | Rp.1.809.413.474.807 | 0,131 | Efektif |
| Kediri | Rp.457.763.422.282 | Rp3.220.459.355.308 | 0,142 | Tidak Efektif |
| Tulungagung | Rp.486.358.101.284 | Rp.2.678.564.625.275 | 0,181 | Tidak Efektif |
| Blitar | Rp.285.742.715.699 | Rp.2.488.790.000.376 | 0,114 | Tidak Efektif |
| Trenggalek | Rp.285.134.071.596 | Rp.2.051.112.353.100 | 0,139 | Tidak Efektif |
| Tuban | Rp.518.003.562.562 | Rp.2.480.943.583.701 | 0,208 | Tidak Efektif |
| Bojonegoro | Rp.561.251.499.956 | Rp.4.793.138.737.980 | 0,117 | Tidak Efektif |

Sumber: Data diolah peneliti, 2021.

| Kabupaten | Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2020 (Rp) | Target Penerimaan PAD tahun 2020 (Rp) | Rasio Efektivitas (%) | Kriteria Rasio Efektivitas |
|-------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Lamongan | Rp.2.838.279.209.371 | Rp.3.098.199.929.800 | 0,916 | Efektif |
| Mojokerto | Rp.565.478.499.016 | Rp.2.602.910.763.381 | 0,217 | Tidak Efektif |
| Nganjuk | Rp.284.983.204.000 | Rp.2.568.651.487.708 | 0,110 | Tidak Efektif |
| Madiun | Rp.288.436.212.751 | Rp.1.981.478.483.891 | 0,145 | Tidak Efektif |
| Pacitan | Rp.383.658.443.118 | Rp.1.716.284.364.165 | 0,223 | Tidak Efektif |
| Magetan | Rp.452.334.876.992 | Rp.1.899.684.108.016 | 0,238 | Efektif |
| Kediri | Rp.497.854.231.449 | Rp.3.415.509.629.858 | 0,145 | Tidak Efektif |
| Tulungagung | Rp.2.762.645.223.248 | Rp.2.763.354.920.105 | 0,999 | Efektif |
| Blitar | Rp.354.377.016.326 | Rp.2.571.913.581.957 | 0,14 | Tidak Efektif |
| Trenggalek | Rp.305.456.773.102 | Rp.2.075.031.298.200 | 0,147 | Tidak Efektif |
| Tuban | Rp.589.413.776.119 | Rp.2.697.295.777.507 | 0,218 | Tidak Efektif |
| Bojonegoro | Rp.586.016.678.432 | Rp.6.404.502.179.188 | 0,091 | Tidak efektif |

Sumber: Data diolah peneliti, 2021.

Pada perhitungan tabel 5.2 di atas peneliti menyimpulkan bahwa pada perhitungan efektivitas daerah di wilayah Mataraman sama-sama rendah di dua periode tersebut. Rasio Efektivitas sendiri merupakan bagaimana pemerintah daerah menunjukkan kemampuannya dalam mengelola penerimaan PAD sesuai dengan yang di targetkan. Buka & Hiola (2021) mengatakan bahwa rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sedangkan pada hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum bisa dalam memobilisasi penerimaan PAD. Dimana hasil persentase dari dua periode tersebut mayoritas kurang dari 100% yang mana hal tersebut di dapat dari sektor keuangan yang realisasi PAD nya tidak sesuai dengan target penerima sehingga anggaran dari daerah yang akan di realisasikan pada pemerintah daerah tidak mencukupi.

Tabel 5.3

Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di wilayah Mataraman 2019-2020

| Kabupaten | Realisasi pengeluaran PAD Tahun 2019 (Rp) | Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2019 (Rp) | Rasio Efisiensi (%) | Kriteria Rasio Efisiensi |
|-------------|---|--|---------------------|--------------------------|
| Lamongan | Rp.23.725.000.000 | Rp. 21.685.432.000 | 1 | Tidak Efisien |
| Mojokerto | Rp.22.994.044.833 | Rp.73.500.000.000 | 0,312 | Sangat Efisien |
| Nganjuk | Rp.15.594.832.700 | Rp.363.968.750.638 | 0,042 | Sangat Efisien |
| Madiun | Rp.5.000.000.000 | Rp.172.034.096.691 | 0,029 | Sangat Efisien |
| Pacitan | Rp.950.000.000 | Rp.245.353.143.546 | 0,003 | Sangat Efisien |
| Magetan | Rp.5.591.000.000 | Rp.74.507.118.392 | 0,075 | Sangat Efisien |
| Kediri | Rp.240.839.243.934 | Rp.297.473.454.103 | 0,809 | Efisien |
| Tulungagung | Rp.5.000.000.000 | Rp.357.383.248.990 | 0,013 | Sangat Efisien |
| Blitar | Rp.23.000.000.000 | Rp.237.755.424.912 | 0,096 | Sangat Efisien |
| Trenggalek | Rp.13.500.000.000 | Rp.240.518.752.576 | 0,056 | Sangat Efisien |
| Tuban | Rp.4.156.858.139 | Rp.311.895.225.613 | 0,013 | Sangat Efisien |
| Bojonegoro | Rp.318.571.942.645 | Rp.201.8047.974.917 | 0,157 | Sangat Efisien |

Sumber: Data diolah peneliti, 2021.

| Kabupaten | Realisasi Pengeluaran PAD Tahun 2020 (Rp) | Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2020 (Rp) | Rasio Efisiensi (%) | Kriteria Rasio Efisiensi |
|-------------|---|--|---------------------|--------------------------|
| Lamongan | Rp.6.950.000.000 | Rp.13.350.000.000 | 0,520 | Sangat Efisien |
| Mojokerto | Rp.145.764.000 | Rp.95.176.627.045 | 0,001 | Sangat Efisien |
| Nganjuk | Rp.24.000.000.000 | Rp.216.814.070.651 | 0,110 | Sangat Efisien |
| Madiun | Rp.5.500.000.000 | Rp.74.085.505.814 | 0,074 | Sangat Efisien |
| Pacitan | Rp.1.450.000.000 | Rp.2.500.000.000 | 0,58 | Sangat Efisien |
| Magetan | Rp.7.600.000.000 | Rp.4.2050.000.000 | 0,180 | Sangat Efisien |
| Kediri | Rp.152.440.977.370 | Rp.470.100.000.000 | 0,324 | Sangat Efisien |
| Tulungagung | Rp.5.000.000.000 | Rp.180.000.000.000 | 0,027 | Sangat Efisien |
| Blitar | Rp.150.000.000.000 | Rp.189.865.521.771 | 0,790 | Efisien |
| Trenggalek | Rp.7.500.000.000 | Rp.104.902.815.000 | 0,071 | Sangat Efisien |
| Tuban | Rp.30.010.310.000 | Rp.95.897.378.185 | 0 | Sangat Efisien |
| Bojonegoro | Rp.30.833.483.916 | Rp.2.319.793.990.235 | 0,013 | Sangat Efisien |

Sumber: Data diolah peneliti,2021.

Pada tabel 5.3 di atas menggunakan Rasio Efisiensi menunjukkan bahwa pada dua periode di wilayah Mataraman tergolong stabil dan baik. Dimana dari dua periode diatas menunjukkan pola hubungan dengan mayoritas sangat efisien dikarenakan hasil persentase dari dua periode tersebut dengan hasil kurang dari 60%. Penjelasan mengenai Rasio Efisiensi sendiri merupakan sebuah langkah membandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan dengan realisasi penerimaan yang akan di terima. Semakin kecil persentase yang di dapat pada suatu daerah maka akan sangat baik. Mardiasmo dalam Buka & Hiola (2021) menyebutkan bahwa jika rasio efisiensi semakin kecil maka kinerja kinerja pemerintah daerah semakin baik hal ini sejalan dengan hasil oenelitian bahwa nilai rasio efisiensi yang diteliti menunjukkan kurang dari 60% atau dalam keadaan stabil dan baik.

Tabel 5.4

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah di wilayah Mataraman 2019-2020

| Kabupaten | Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2019 (Rp) | Pertumbuhan PAD 2019 (%) |
|-------------|--|--------------------------|
| Lamongan | 21.685.432.000,00 | 2.644.108.257.701 |
| Mojokerto | Rp.73.500.000.000 | 56.499 |
| Nganjuk | Rp.363.968.750.638 | -2.235.857.003.953 |
| Madiun | Rp.172.034.096.691 | 13.592.403.055 |
| Pacitan | Rp.245.353.143.546 | 139.119.499.999 |
| Magetan | Rp.74.507.118.392 | 1.572.035.768.764 |
| Kediri | Rp.297.473.454.103 | 277.247.954.103 |
| Tulungagung | Rp.357.383.248.990 | 30.826.610.053 |
| Blitar | Rp.237.755.424.912 | -283.253.925.700 |
| Trenggalek | Rp.240.518.752.576 | 1.765.978.281.503 |
| Tuban | Rp.311.895.225.613 | -269.059.978.862 |
| Bojonegoro | Rp.201.8047.974.917 | 4.231.887.238.024 |

Sumber: Data diolah peneliti, 2021.

| Kabupaten | Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2020 (Rp) | Rasio Pertumbuhan PAD 2020 (%) |
|-------------|--|--------------------------------|
| Lamongan | Rp.13.350.000.000 | -3.045.817.930.502 |
| Mojokerto | Rp.95.176.627.045 | 95.030.863.044 |
| Nganjuk | Rp.216.814.070.651 | 253.214.070.650 |
| Madiun | Rp.74.085.505.814 | -1.910.911.499.595 |
| Pacitan | Rp.2.500.000.000 | 1.049.999.999 |
| Magetan | Rp.4.2050.000.000 | 34.449.999.999 |
| Kediri | Rp.470.100.000.000 | 470.099.999.999 |
| Tulungagung | Rp.180.000.000.000 | -1 |
| Blitar | Rp.189.865.521.771 | 189.865.521.770 |
| Trenggalek | Rp.104.902.815.000 | 97.402.814.999 |
| Tuban | Rp.95.897.378.185 | 95.897.378.184 |
| Bojonegoro | Rp.2.319.793.990.235 | 2.319.793.990.234 |

Sumber: Data diolah sendiri, 2021.

Pada tabel 5.4 diatas peneliti mendapatkan hasil dengan menghitung menggunakan rumus pada Rasio Pertumbuhan dengan hasil negatif baik dari Rasio pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan Pendapatan, dan Rasio Pertumbuhan Belanja. Dapat dijelaskan dari perhitungan tersebut bahwa tingginya PAD yang di peroleh dan belanja operasi dengan belanja modal yang rendah, yang menyebabkan pemerintah dalam mencapai belanja modal atau sumber daya tetap tidak mencukupi. Hasil positif hanya di peroleh pada Kabupaten Lamongan di periode 2019 dengan Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Rasio Pertumbuhan Belanja. Sedangkan untuk daerah yang lain dengan hasil -1,0%. Pada periode 2020 dalam Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Rasio Pertumbuhan belanja juga mendapatkan hasil negatif yaitu -1,0%.

KESIMPULAN

Sesuai pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah kabupaten di wilayah Mataraman tahun anggaran 2019-2020 sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian pada daerah di wilayah Mataraman periode 2019-2020 sudah optimal dengan tingkat kemandirian yang tinggi dan termasuk dalam kategori delegatif.
2. Rasio Efektivitas pada daerah di wilayah Mataraman tahun anggaran 2019-2020 masih belum tergolong di kategori belum efektif dikarenakan ketidaksesuaiannya realisasi PAD dengan target penerima anggaran dari daerah.
3. Rasio Efisien pada daerah di wilayah Mataraman tahun anggaran 2019-2020 tergolong sangat efisien dan stabil

Rasio Pertumbuhan pada daerah di wilayah Mataraman tahun anggaran 2019-2020 dengan hasil pertumbuhan negatif dimana tingginya PAD, belanja operasi dengan diikutinya belanja modal yang menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, A. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka – Jawa Barat Jurnal Sekuritas Prodi Manajemen Unpam. *Jurnal Sekuritas*, 11(44), 38–51.
- Buka, N. F. M., & Hiola, Y. (2021). Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo. *JSAP : Journal Syariah and Accounting Public*, 4(1), 9. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.1.9-15.2021>
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33–48.
- Fidelius. (2013). Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *EMBA*, 1(4).
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Handayani, N. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3).
- Hanik, U., & Karyanti, D. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Daerah sebagai Penilaian Kinerja*. 22(2).
- Hariyanti, D., Marheni, & Yenfi. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2010-2015. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis Dan Keuangan STIE-IBEK*, 10(November), 48–59.
- Karlina, A., & Handayani, N. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD di Kota Surabaya Tahun 2012-2015. *Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)*, 6(3), 910–924.

- Leni, N. (2012). Demokrasi dan Budaya Politik Lokal di Jawa Timur Menurut R. Zuhro, Dkk. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 8(1), 20–39.
- Lestari, D. L., Hidayati, A. N., & Habib, M. A. (2022). Pengaruh Earning Per Share, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2021. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, IV(11), 4928-4936.
- Marheni. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2010-2015 (Studi Kasus Pada Pemda Kota Pangkalpinang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis & Keuangan (JIABK)*, 10(2).
- Mokodompit, P. S., Pangemanan, S. S., & Elim, I. (2014). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. *EMBA*, 2(2).
- Nurdiwaty, D., & Zaman, B. (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri). *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 07(01), 31–40.
<https://doi.org/10.22219/jekobisnis.v7i1.3382>
- Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 4(1).
- Oktrivina, A., Siregar, D., & Mariana, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat). *Journal IMAGE* /, 9(1), 1–19.
- Pandjaitan, M. F., Tommy, P., & Untu, V. N. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(3), 1398–1408.
<https://doi.org/10.35794/emba.v6i3.20224>
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015. *Accountability*, 6(1), 45.
<https://doi.org/10.32400/ja.16026.6.1.2017.45-56>
- Rahmawati, N., & Putra, I. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(3), 1767–1795.
- Ramadhani, F. R. (2016). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 85.
<https://doi.org/10.22219/jep.v14i1.3846>
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759.
<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovasi Bisnis*, 7, 147–153.
<https://doi.org/10.47221/tangible.v5i1.103>

- Sartika, N., & Pratama, A. I. (2019). Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 - 2016. *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 179–188. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i2.6494>
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Wahyuni, N. (2010). Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).